

**PERJANJIAN MULTI JASA**

No.Rekg.186.0.00238.1

" Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu "  
( Surat Al Maa-idah 1, )

Perjanjian Multijasa ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Senintanggal di Kantor  
PT. BPR. Syari'ah Al Falah Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin oleh  
dan antara :

I. Nama : M. Izza Fahlepy,  
Nama : Agustini, SC

masing-masing Direktur Utama dan Direktur PT. BPR. Syari'ah Al Falah bertindak untuk dan atas  
nama PT. BPR. Syari'ah Al Falah berkedudukan di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa  
Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut Bank.

II. Nama : AHMAD I. SYARAH  
Pekerjaan :  
Alamat : COTY INTER  
No. KTP : 147 51

Selanjutnya disebut Nasabah

**MENIMBANG**

- Bahwa Nasabah dalam rangka perjanjian Al Multijasa ini telah mendapat persetujuan dari selaku saudara sebagaimana tercantum dalam formulir Persetujuan dan Tanggung Jawab (terlampir)
- Bahwa untuk maksud-maksud tersebut diatas kedua belah pihak dengan ini menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengadakan Perjanjian Al- Multijasa dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**PENGERTIAN**

Al- Multijasa adalah transaksi upah mengupah atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran imbalan jasa yang disepakati oleh pihak Bank dan Nasabah (selanjutnya disebut Pembiayaan)

**Pasal 2**

**PEMBIAYAAN MULTIJASA**

Bank Memberikan Pembiayaan sebesar Rp. ( ) yang akan digunakan Nasabah untuk keperluan membayar

**Pasal 3**

**IMBALAN JASA**

Bank mendapat imbalan jasa (ujrah/fee) dari NASABAH sehubungan dengan pemberian Pembiayaan sebagaimana diatur didalam pasal 2 Perjanjian ini sebesar Rp. ( )



#### Pasal 4

### JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN

- Jangka waktu Pembiayaan ini selama 24 bulan, terhitung sejak tanggal 12 April 2015 hingga tanggal 12 April 2017.
2. Jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK atas Pembiayaan ini adalah sebesar Rp. 14.400.000 (Empat Belas Ribu Empat Ratus Ribu) yaitu Pokok Pembiayaan dengan imbalan jasa, sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo pasal 3 Perjanjian ini.
  3. Nasabah wajib melakukan pembayaran kembali kepada Bank secara angsuran dengan tertib dan teratur sesuai jadwal angsuran, sebagaimana terlampir.
  4. Semua Pembayaran kembali/pelunasan oleh NASABAH kepada BANK akan dilaksanakan melalui rekening NASABAH yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK, dan dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran angsuran dan biaya-biaya lainnya.

#### Pasal 5

### BIAYA ADMINISTRASI

1. NASABAH diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 175.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. Dalam hal diperlukan jasa-jasa notaris, asuransi dan atau jasa-jasa lainnya seluruhnya dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala biaya tersebut ditanggung oleh Nasabah.
3. Semua bukti yang dikeluarkan BANK atau kuasanya adalah merupakan bukti yang sudah diakui oleh NASABAH.

#### Pasal 6

### JAMINAN

NASABAH dengan membayar dan menyerahkan jaminan sebagai berikut untuk menjamin pembayaran kembali Pembiayaan, maka dengan ini NASABAH menjaminkan :

1 UNIT MOTOR YAMAHA TAHUN 2011 BUKTI KEPEMILIKAN BERUPA BPKB NO K-00085708 NO POL BC 5415 ZC AN RUSLINA NILAI TAKSIR Rp 7.500.000

#### Pasal 7

### EKSEKUSI JAMINAN

- BANK dapat mengeksekusi, menyita atau menjual jaminan NASABAH sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perjanjian ini guna melunasi seluruh kewajiban NASABAH di BANK apabila :
1. NASABAH tidak membayar kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat 3 Perjanjian ini atau
  2. Pembiayaan NASABAH di BANK telah tertunggak selama 3 (tiga) bulan atau lebih atau
  3. NASABAH telah Cidera janji sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perjanjian ini dan/atau NASABAH melakukan pelanggaran terhadap Syarat-syarat Perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perjanjian ini.

#### Pasal 8

### PELANGGARAN ATAS SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Bahwa NASABAH dianggap melanggar syarat-syarat Perjanjian jika terbukti melanggar dan/atau menyimpang dari salah satu atau semua ketentuan yang termaktub dalam pasal ini dan atau perjanjian ini :

1. Jika NASABAH menggunakan dana Pembiayaan yang diberikan oleh BANK kepada NASABAH digunakan diluar keperluan dan kepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian ini.
2. Jika NASABAH melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan,



konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain.

#### **Pasal 9 FORCE MAJEURE**

Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Gempa Bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambar petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
2. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang atau pemberontakan yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Force majeure dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatas tidak dapat dijadikan alasan oleh NASABAH untuk menunda kewajiban pembayaran Pembiayaan NASABAH kepada BANK kecuali ditentukan lain sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal 10 Perjanjian ini.

#### **Pasal 10 DENDA**

1. NASABAH bersedia membayar denda sebesar Rp. 0 ( 0 rupiah ) perbulan, jika lalai dan/atau dengan sengaja tidak membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
2. Denda tidak dikenakan apabila terjadi peristiwa force majeure dan/atau NASABAH memberitahukan kepada BANK tentang keterlambatan pembayaran angsuran NASABAH selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo dan memberitahukan kepada pihak BANK hari dan tanggal pembayaran angsuran penundaan tersebut.
3. Pembayaran penundaan angsuran selambat-lambatnya 5 (lima) hari ini setelah tanggal jatuh tempo hanya boleh dilakukan dalam yang sama.
4. Pemanfaatan hasil denda adalah untuk kegiatan kegiatan sosial. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/SDN-MUI/2000.

#### **Pasal 11 GANTI RUGI**

1. BANK dapat mengenakan ganti rugi hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada NASABAH yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada BANK.
2. Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan anatar BANK dengan NASABAH.
3. Ganti rugi hanya boleh dikenakan BANK sebagai pemilik dana (shahibul maal) apabila keuntungan BANK yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh NASABAH sebagai pengguna dana (mudharib).

#### **Pasal 12 HUKUM YANG MENGATUR**

Perjanjian ini dibuat oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.

#### **Pasal 13 DOMISILI HUKUM**

Sesuatu sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri



LAPORAN

AL FALAH

Persembung - Pengkalan Bala KM 14

No. 124

Norma

#### Pasal 14

#### KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak kedalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagai dicantumkan diatas.

PT. Bank Pembiayaan Syariah Al Falah

Direksi

Nasabah

186.0.002.10.1.01.271041

186.0.002.10.1.01.271041

184.1.002.10.1.01.271041

186.0.002.10.1.01.271041

186.0.002.10.1.01.271041

186.0.002.10.1.01.271041

186.0.002.10.1.01.271041

186.0.002.10.1.01.271041

186.0.002.10.1.01.271041



**PERATURAN PERUSAHAAN**  
**NOMOR : 24/10/DIR-KOM/VII/2019**

**TENTANG**  
**HUBUNGAN KERJA, SYARAT-SYARAT KERJA**  
**DAN JOBDES DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

**Pasal 1**  
**Tujuan**

Tujuan dari pada peraturan perusahaan ini adalah untuk mengatur, syarat-syarat kerja dan Jobdes terkait jabatan Dewan Pengawas Syariah, sehingga dapat tercipta pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian tujuan perusahaan secara harmonis

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Peraturan Perusahaan ini berlaku bagi Dewan Pengawas Syariah PT. BPR Syariah Al Falah. Peraturan Perusahaan ini dapat diubah oleh Pemegang Saham dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi perusahaan, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS

**Pasal 3**  
**Pengertian Istilah**

Sesuai Keputusan Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengertian Dewan Pengawas Syariah bahwa, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di Lembaga Keuangan Syariah.

**BAB II**  
**PENERIMAAN DAN PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

**Pasal 4**  
**Persyaratan Penerimaan Dewan Pengawas Syariah**

1. Sesuai Undang-Undang No.40 Tentang Perseroan Terbatas bahwa ketentuan dan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah :

Pasal 109 :

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan Prinsip Syariah



2. Syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah :
- a. BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS
  - b. Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - c. Integritas
    1. Memiliki akhlak dan moral yang baik
    2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Perbankan Syariah dan peraturan
    3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat
    4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus keputusan dan kelayakan
  - d. Kompetensi  
Kompetensi yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum
  - e. Reputasi Keuangan yang paling kurang mencakup :
    1. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet
    2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

Pasal 30 :

- a. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 3 orang
- b. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS
- c. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

#### Pasal 5

#### Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang BPRS :

Pasal 31 :

1. Penunjukan anggota DPS harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
2. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
3. Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

#### Pasal 6

#### Pengesahan Hubungan Kerja

Sebelum hubungan kerja dengan perusahaan dimulai, setiap Dewan Pengawasan Syariah akan diberi Peraturan Perusahaan ini dan membubuhkan tandatangannya sebagai persetujuan terhadap isi Peraturan Perusahaan ini

### **BAB III JAM KERJA**

#### Pasal 7

Dewan Pengawas Syariah tidak terikat standar jam kerja yang mengharuskan masuk hadir secara fisik, namun harus memungkinkan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk melaksanakan tugas pengawasan, antara lain dengan kunjungan kerja yang teratur membaca laporan bank maupun melakukan inspeksi mendadak.



## **BAB IV HONORARIUM**

### **Pasal 8**

Honor Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Besarnya honor Ketua DPS maksimum 30% dari honor Komisaris Utama, sedangkan honor anggota DPS adalah maksimum 75% dari honor Ketua Dewan Pengawas Syariah

1. Besarnya honor Dewan Pengawas Syariah senantiasa disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu
2. Honor Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh RUPS adalah honor pokok sebelum dipotong pajak dan zakat
3. Pembayaran honor dilaksanakan setiap tanggal 25 bulan yang bersangkutan, apabila tanggal 25 jatuh pada hari minggu, hari raya atau hari libur resmi lainnya, maka pembayaran honor akan dilaksanakan sehari sebelum hari-hari tersebut.

## **BAB V JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN DEWAN PENGAWAS**

### **Pasal 9**

#### **Fasilitas Pembiayaan**

1. Sebagai salah satu komponen kesejahteraan kepada Dewan Pengawas Syariah, perusahaan akan memberikan pembiayaan kepada Dewan Pengawas Syariah, sepanjang tidak melanggar Peraturan POJK No.3/POJK.03/2016 tanggal 31-12-2016 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank (BMPD).
2. Tidak tergolong melanggar BMPD (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan), apabila pembiayaan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta di bayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPRS.
3. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat pembiayaan dari perusahaan tetapi karena satu dan hal terputus atau memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan, maka segala sesuatu kewajiban yang menyangkut pembiayaan tersebut harus diselesaikan. Bank berhak memotong dari seluruh pendapatan yang masih akan diterima oleh Dewan Pengawas Syariah, misalnya sisa honor dan uang jasa untuk melunasi sisa pembiayaan yang masih ada beserta kewajiban lainnya yang melekat pada pembiayaan tersebut. Bila terdapat kekurangan maka wajib diselesaikan sisanya seketika.

### **Pasal 10**

#### **Tunjangan Perjalanan Dinas**

Jika Dewan Pengawas Syariah diminta secara resmi oleh perusahaan, atau karena sifat dari tugas-tugas yang mengharuskan Dewan Pengawas Syariah tersebut melakukan perjalanan dinas keluar kota guna kepentingan perusahaan, maka semua biaya yang wajar yang dikeluarkan dapat di bayar kembali oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

1. Biaya tiket pesawat / media transportasi lainnya
2. Biaya akomodasi
3. Uang harian perjalanan dinas

Dalam hal diperoleh penggantian biaya dari lembaga yang mengundang maka penggantian dimaksud dikembalikan kepada perusahaan.

Besarnya uang harian (uang saku) akan diatur dalam memorandum / SK tersendiri



**Pasal 11**  
**Penggunaan Laba**

Laba bersih perusahaan dalam satu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diberikan kepada Dewan Pengawas Syariah yang besarnya diatur dalam memorandum tersendiri dan dibagikan secara merata sesuai jumlah Dewan Pengawas Syariah.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI**

**Pasal 12**  
**Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

1. Kewajiban dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam Anggaran Dasar PT. BPR Syariah Al Falah dalam melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Bank dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariah
2. Kewajiban dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sesuai POJK No : 24/POJK.03/2018 Tanggal 10-12-2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS
  - a. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam penghimpunan dana , pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
  - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
    1. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS
    2. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya
    3. Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS
    4. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya
  - c. Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 & 44 POJK No : 24/POJK.03/2018.

**Pasal 13**  
**Rapat Dewan Pengawas Syariah**

1. Rapat Dewan Pengawas Syariah dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu
2. Rapat diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun
3. Panggilan rapat Dewan Pengawas Syariah disampaikan kepada seluruh anggota DPS secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak sekurang-kurangnya 3 hari sebelum rapat dilaksanakan
4. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat
5. Rapat Dewan Pengawas Syariah diadakan ditempat kedudukan perseroan
6. Apabila semua anggota DPS hadir, rapat Dewan Pengawas Syariah dapat dilaksanakan dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat
7. Rapat Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh Ketua DPS, dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ke tiga maka rapat Dewan Pengawas Syariah akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir.
8. Keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat



Pasal 14  
Rahasia Jabatan

Dewan Pengawas Syariah mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala urusan yang berkaitan dengan perusahaan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan metoda jalannya perusahaan, perlengkapan, sistem-sistem inventaris, perincian kontrak nasabah dan data-data lainnya terutama kerahasiaan Bank sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Anggaran Dasar Perusahaan

Pasal 15  
Tindakan-Tindakan Terlarang

Dewan Pengawas Syariah dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan
2. Mabok, madat atau menjadi pemakai obat terlarang atau narkotika atau bermain judi
3. Melakukan perbuatan asusila / tidak bermoral misalnya, melakukan perselingkuhan
4. Melakukan tindakan kejahatan misalnya : mencuri, menggelapkan milik perusahaan, menipu, memperdagangkan barang terlarang atau pelanggaran berat lainnya dari Undang-Undang Republik Indonesia
5. Membujuk nasabah, para Dewan Pengawas Syariah, Komisaris, Direksi dan atau Karyawan maupun keluarga mereka untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan
6. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan perusahaan dalam keadaan bahaya
7. Membongkar rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik para Dewan Pengawas, Direksi perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara
8. Melanggar pertentangan kepentingan seperti tersebut dibawah ini :
  - a. Menerima apalagi meminta sesuatu dari nasabah atau pihak ketiga lainnya secara langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar. Sengaja atau tidak disengaja yang dapat mempengaruhi dalam suatu pengambilan keputusan, baik yang sudah maupun akan diambil, yang menguntungkan nasabah / pihak yang bersangkutan dan atau akan merugikan bank secara langsung atau tidak langsung, saat itu atau dikemudian hari, secara materiil financial maupun immaterial atau non financial, menggundang tanggapan negative masyarakat
  - b. Memberikan kemudahan kepada nasabah atau pihak ketiga lainnya dalam bentuk mengabaikan sesuatu ketentuan Bank atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/ Pemerintah dengan atau tanpa maksud untuk memperoleh imbalan dari nasabah / pihak yang bersangkutan, baik kemudahan itu dalam bentuk kebijaksanaan yang menyimpang dalam memproses suatu fasilitas pembiayaan maupun dalam bentuk lainnya.
  - c. Ikut campur secara langsung dalam pengurusan Perusahaan.
9. Tidak melaksanakan pengawasan syariah sebagaimana mestinya
10. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dapat menimbulkan penilaian tidak baik kepada perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 16  
Pemberhentian Sementara dan Kesempatan Untuk Membela Diri

RUPS sewaktu-waktu berhak memberhentikan sementara terhadap Dewan Pengawas Syariah karena pelanggaran pada pasal 16 Peraturan Perusahaan ini.

1. Anggota DPS dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS dengan menyebutkan alasannya
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota DPS bersangkutan
3. Anggota DPS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud tidak berwenang melakukan tugas



4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS
5. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud anggota DPS yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri
6. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara DPS
7. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota DPS yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya
8. Dalam hal jangka waktu 30 hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.

## **BAB VII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 17**

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah hendak memutuskan hubungan kerjanya, ia harus mengajukan permohonan mengundurkan diri tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Perusahaan berkewajiban memberikan honoraria yang belum dibayarkan dan berhak mengenakan potongan-potongan untuk pembayaran sisa pembiayaan / kewajibannya. Dewan Pengawas Syariah tersebut harus menyelesaikan seluruh kewajibannya di BPRS. Kewajiban kepada perusahaan akan dipotong dari uang penghargaan yang dibayarkan dan diwajibkan menyetor apabila masih terdapat kekurangan. Besaran uang penghargaan / uang jasa yang akan diterima sesuai dengan kebijakan pengurus.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 18**

Peraturan Perusahaan ini akan diberikan kepada seluruh Dewan Pengawas Syariah dan ditandatangani oleh setiap Dewan Pengawas Syariah diatas materai secukupnya.

### **Pasal 19**

Sewaktu-waktu Perusahaan dapat melakukan perubahan atas peraturan perusahaan ini dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan peraturan perusahaan menyangkut Dewan Pengawas Syariah ini mulai berlaku sejak ditetapkan, sesuai amanat RUPS yang memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyusun Peraturan Perusahaan ini.

Ditetapkan di : Banyuasin .

Tanggal : 1 Juli 2019

PT. Bank Pembiayaan Rakyat. Syari'ah Al Falah  
Dewan Komisaris,

Drs.Mgs.HM.Yunus Umrie  
Komisaris Utama

Dr.H.Hakim Sorimuda Pohan,Sp.OG  
Komisaris





**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH AL FALAH**

Jalan Raya Palembang - Pangkalan Balai km 14,5 Kel. Sukajadi  
Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin  
Telp. (0711) 430028 / Fax (0711) 432008



Nomor : 25/010/DIR – OPS/UMUM  
Lamp : -

Banyuasin, 27 Januari 2020

Kepada Yth.  
Ketua Dewan Syari'ah Nasional MUI  
Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan  
Jakarta Pusat 10320

Perihal : Mohon Petunjuk Aplikasi Produk Multijasa

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, teriring salam dan Doa semoga Ketua dan seluruh Pengurus Dewan Syari'ah Nasional MUI senantiasa mendapat limpahan rahmat serta keberkahan dari Allah SWT dalam menjalankan Aktivitas sehari-hari, Amin.

Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa PT. BPR Syari'ah Al Falah telah berdiri dan berkiprah ditengah umat dari tahun 1995 hingga sekarang yang melayani masyarakat baik di Kabupaten Banyuasin sebagai homebase maupun kota Palembang.

Adapun produk yang dijalankan masih dominan Jual Beli / Pembiayaan Murabahah serta sangat sedikit Pembiayaan Mudharabah / bagi hasil, sedangkan produk yang gencar kami kembangkan adalah Pembiayaan Multijasa untuk manfaat bagi : Pendidikan, Kesehatan, Wisata, Ibadah Umroh dan Sosial Kemasyarakatan.

Dari teknis yang telah kami lakukan dan jalankan tentu tidak terlepas dari masih belum sempurnanya dalam menjalankan Syariah Islam sesuai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI yang tentunya jadi pedoman dalam mengAplikasikan konsep tersebut. Ada beberapa yang perlu kami sampaikan atas produk multijasa terkait teknis meliputi:

1. Apakah biaya Jasa yang jadi objek, wajib untuk melakukan pembayaran langsung sesuai dengan akad seperti: untuk pembayaran pembiayaan pendidikan, pembayaran biaya kesehatan di rumah sakit. (Selama ini Bank hanya mewakalahkan / mewakilkan untuk melakukan pembayaran) setelah itu Bank akan memintakan PrintOut / Kwitansi / Faktur atau rincian biaya tersebut.
2. Bagaimana jika Case by Case pada saat bukti biaya yang dibayarkan dari Bank tidak sebesar pinjaman atau pembiayaan, hal ini disebabkan karena ada point – point tertentu dari biaya jumlahnya tidak signifikan sehingga untuk mencukupi jumlah tersebut di buat catatan / pernyataan atas penggunaan biaya dimaksud .



Contoh : - Biaya Pendidikan untuk pendaftaran anak sekolah di mana ada biaya tertentu tidak terdapat bukti dari pihak sekolah.

- Biaya Kesehatan untuk Operasi dimana ada beberapa objek tidak termasuk dalam jumlah tagihan di Rumah Sakit.

3. Produk Multijasa pada saat ini menyumbang  $\pm 10\%$  Outstanding dalam Penyaluran Produk Multijasa, termasuk didalamnya untuk kebutuhan biaya Sosial Kemasyarakatan seperti : Membiayai Calon Debitur dalam biaya Pernikahan , Persedekahan / Khitanan dan lain – lain termasuk didalamnya untuk Resepsi meliputi : Biaya Katering, Tenda, Kursi, Sewa Pelaminan, Gaun, Sewa Gedung, Cetak Undangan, Souvenir , Biaya Foto/Vidio, Biaya Hiburan/ Musik dan lain – lain.

Atas hal ini, kami pengurus mohon masukkan serta penjelasan terkait beberapa produk yang sudah kami lakukan, walaupun kami selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah Bank, namun akan lebih afdol dan kompeten case ini kami sampaikan ke Dewan Syari'ah Nasional MUI yang mengeluarkan Fatwa Produk Bank Syari'ah agar keberadaan sistem syari'ah di PT. BPR Syari'ah Al Falah akan semakin kaffah dan berkah bagi Umat, Aamiin.

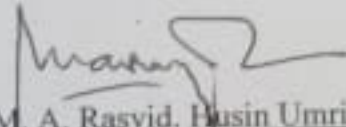
Demikian, besar harapan kami ketua dan pengurus Dewan Syari'ah Nasional MUI dapat membalas surat ini. Atas perhatian dan penjelasannya diucapkan terima kasih.


**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Ditetapkan di : Sukajadi


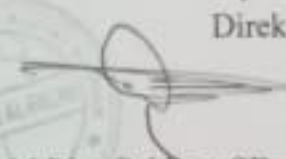
Pada Tanggal : 24 Pebruari 2012

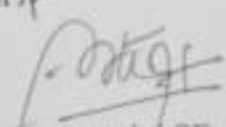
Mengetahui,  
Dewan Pengawas Syariah

  
Drs. HM. A. Rasyid, Husin Umrie, MBA  
Ketua

  
Drs. H. Hambali, MSi  
Anggota

PT. BPR Syari'ah Al Falah  
Direksi

  
  
M. Riza Pahlepy, SE  
Direktur Utama

  
Agustini, SE  
Direktur



Palembang, 10 Januari 2020

Kepada Yth.

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

KR 7 Propinsi Sumatera-Selatan

Di – Palembang.

Perihal : Laporan Hasil Pengawasan DPS BPRS ALFALAH Semester II 2019

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini kami laporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah periode 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, yang memuat :

- a. Laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional;
- b. Opini syari'ah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank;
- c. Opini syari'ah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional Bank dalam laporan publikasi Bank.

Demikianlah agar maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua,



Drs.H.M.A.Rasyid Hs. Umrie,M.BA.

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

PT.BPR.Syari'ah Al-Falah,

Anggota,



Drs.H.Hambali,M.Si.

cc.

1. Direksi PT.BPR Syari'ah Al-Falah
2. Dewan Komisaris PT.BPR Syari'ah Al-Falah
3. Dewan Syari'ah Nasional



# DAFTAR KERTAS KERJA LAPORAN PENGAWASAN

## DEWAN PENGAWAS SYARI'AH



Nama Bank Syari'ah : PT BPR Syari'ah Al-Falah

Tanggal Laporan : 1 Juli s/d 31 Desember 2019

No.	Uraian	Pendapat DPS		
		Sesuai syari'ah	Tidak sesuai	Catatan (dalam lampiran)
1	Kesesuaian produk dan jasa bank dengan fatwa DSN			
	a. Penghimpunan Dana			
	- Giro	-	-	-
	- Tabungan	√	-	-
	- Deposito	√	-	-
	- Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-
	- Penerimaan dana dari bank lain	√	-	-
	- Lainnya	-	-	-
	b. Penyaluran Dana			
	- Murabahah	√	-	-
	- Istisna	-	-	-
	- Salam	-	-	-
	- Mudharabah	√	-	-
	- Musyarakah	√	-	-
	- Ijarah	√	-	-
	- Qardh	√	-	-
	- Pembelian surat berharga	-	-	-
	- Penempatan pada bank lain	√	-	-
	- Lainnya	-	-	-
	c. Jasa-jasa	-	-	-
	- Wakalah	√	-	-
	- Kafalah	√	-	-
	- Rahn	-	-	-
	- Multi Jasa	√	-	-
	- Lainnya	-	-	-
2	Apakah terdapat produk dan jasa yang dilakukan bank yang tidak/belum diatur dalam Fatwa DSN	-	-	Tidak ada
3.	Pedoman Operasional dan Produk Bank telah sesuai dengan prinsip syari'ah dalam Fatwa DSN			
	a. Pedoman Operasional Penghimpunan Dana	√	-	-
	b. Pedoman Operasional Penyaluran Dana	√	-	-
	c. Pedoman Operasional Jasa	√	-	-
	d. Pedoman Perhitungan Distribusi bagi hasil	√	-	-



	e. Pedoman Akuntansi sesuai dengan PSAK & PAPI	√	-	-
4.	Opini syari'ah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional Bank dalam laporan publikasi bank	√	-	-
5.	Informasi temuan syari'ah lainnya dari DPS	-	-	-
6.	Usulan dan rekomendasi	-	-	-

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs.H.M.A.Rasyid Hs. Umrie,M.BA.	Ketua DPS	
2	Drs.H.Hambali,M.Si.	Anggota DPS	



## **OPINI SYARI'AH ATAS PEDOMAN OPERASIONAL DAN PRODUK YANG DIKELUARKAN OLEH BANK**

Pada periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2019, PT.BPR-Syari'ah Al-Falah menggunakan Pedoman Operasional dan Produk yang merujuk kepada Standar Operasional dan Produk BPR-Syari'ah yang diterbitkan oleh ASBISINDO (Asosiasi Bank Syari'ah Indonesia). Adapun produk yang ada di BPR-Syari'ah meliputi :

1. Penghimpun dana : a. Tabungan  
b. Deposito  
c. Penerimaan dana dari bank lain (*linkageprogram*)
2. Penyaluran dana : a. Murabahah  
b. Mudharabah  
c. Musyarakah  
d. Ijarah  
e. Qardh
3. Jasa : a. Wakalah  
b. Kafalah  
c. Multi Jasa

### **I. Penghimpunan Dana**

#### **1.1. Tabungan**

Prinsip tabungan atau simpanan yang berlaku adalah prinsip Al-Wadiah. Al-Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.

Landasan syari'ah yang digunakan adalah :

##### **1) Al-Qur'an**

- a. Surat An-Nisa : 58

*"Sungguh Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat/titipan kepada yang berhak menerimanya"*

- b. Surat Al-Baqarah : 283

*"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya"*



## 2) Al-Hadits

### a. Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah

*“Rasul bersabda : sampaikan/tunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”*

### b. Riwayat Thabrani dari Abdullah bin Umar

*“Rasul bersabda : tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak amanah, tiada shalat bagi orang yang tidak bersuci”.*

Tabungan di BPR-Syari'ah Al-Falah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

## 1.2. Deposito

Deposito mudharabah adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya dilakukan sesuai dengan angka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo diberlakukan sama dengan deposito baru, tetapi jika pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis, tidak diperlukan akad baru. Dalam hal ini deposan sebagai *shahibul maal* (pemilik harta) dan Bank sebagai *mudharib* (pengelola). *Mudharib* menginvestasikan dana kepada hal-hal yang produktif dan tidak melanggar ketentuan perbankan dan fatwa DSN. Pembagian hasil usaha atas investasi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sejak awal akad.

Landasan syari'ah :

### 1) Al-Qur'an

#### a. Surat An-Nisa : 29

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan/mengambil harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling sukarela diantara kamu”*

#### b. Surat Al-Baqarah : 283

*“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya”*

#### c. Surat Al-Maidah : 1

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.*



## 2) Al-Hadits

Riwayat Thabrani dan Abdullah bin Abbas

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mengajukan syarat kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan itu didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya”.*

Deposito di BPR-Syari’ah Al-Falah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

### 1.3. Penerimaan Dana dari Bank Lain

1.3.1. Terdapat Tiga Bank Perkreditan Rakyat yang menempatkan deposito di BPRS Al-Falah. Dua Bank Perkreditan Rakyat tersebut adalah :

1. Sumsel – Palembang
2. Utomo Manunggal Sumsel - Batu Raja OKU

1.3.2. Terdapat pinjaman berupa *Linkage Program* dari Bank SumselBabel Syariah, Pinjaman Musyarakah dari Bank Syariah Mandiri dan pinjaman Mudharabah dari Bank Syariah Mandiri.

Penerimaan dana dari bank lain di BPR-Syari’ah Al-Falah telah sesuai dengan prinsip syari’ah karena menganut sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama.

## II. Penyaluran Dana

### 2.1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Murabahah di BPRS Al-Falah dilaksanakan dengan dua pola, yaitu Wakalah dan pembelian barang secara langsung (tanpa perantara) oleh bank.

Dalam pola Wakalah, BPRS Al-Falah menyerahkan dana kepada nasabah untuk membeli barang. Bank mengikuti proses pembeliannya sehingga yakin bahwa pembelian itu telah dilakukan dengan benar.

Dalam pembelian barang secara langsung oleh Bank, selanjutnya nasabah membeli barang bank dengan tambahan margin keuntungan bank dari yang disepakati bersama.

Landasan syari'ah :

1) Al-Qur'an

- a. Surat Al-Baqarah : 275

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*

- b. Surat An-Nisa : 29

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan/mengambil harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling sukarela diantara kamu".*

2) Al-Hadits

- a. Hadits Riwayat Ahmad, Al-Bazzar, dan Thabrani

*"Rasulullah bersabda : pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur".*

- b. Hadits Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Said Al-Khudri

*"Rasulullah bersabda : sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka".*

- c. Hadits dari Abdullah Ibnu Haris dari Hakim Ibnu Hizam

*"Rasulullah bersabda : penjual dan pembeli sama-sama bebas menentukan jual beli selagi keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang jual beli diberkahi Allah, tetapi jika saling mendustai dan curang, berkah jual beli mereka akan terhapus".*

Murabahah di BPR-Syari'ah Al-Falah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.

2.2. Mudharabah

Akad Mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahib al-mal*) dengan nasabah sebagai *mudharib*. Mudharib yang mempunyai keahlian untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.

Landasan syari'ah :

1) Al-Qur'an

- a. Surat Al-Jumu'ah : 10

*"Apabila telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah".*



- b. Surat Al-Baqarah : 198

*“Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan dari Tuhanmu)”.*

2) Al-Hadits

- a. Riwayat Thabrani dan Abdullah bin Abbas

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mengajukan syarat kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan itu didengar oleh Rasulullah, beliau membenarkannya”.*

- b. Hadits Riwayat IbnuMajah dari Suhaib bin Umar

*“Rasul bersabda : ada tiga hal yang mengandung berkah : 1. Jual beli tidak secara tunai; 2. Muqaradhah/Mudharabah; 3. Mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual ”.*

Mudharabah di BPR-Syari’ah Al-Falah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah.

2.3. Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Landasan syari’ah :

1) Al-Qur’an

- a. Surat Shad : 24

*“Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih. Amat sedikitlah mereka ini”.*

- b. Surat Al-Maidah : 283

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.*

2) Al-Hadits

- a. Riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah

*“Allah swt berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”.*

Musyarakah di BPR-Syari'ah Al-Falah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah.

#### 2.4. Ijarah

Ijarah adalah pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.

Landasan Syari'ah :

##### 1) Al-Qur'an

###### a. Surat Al-Qashash : 26

*"Seorang dari dua wanita itu berkata : Wahai Ayahku, ambillah ia (Musa) sebagai orang yang bekerja pada kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"*

##### 2) Al-Hadits

###### a. Riwayat Abu Dawud dari sahabat Said ibn Abi Waqqash

*"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan bayaran emas atau perak".*

Ijarah di BPR-Syari'ah Al-Falah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah.

#### 2.5. Al-Qardh

Al-Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya tepat pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syari'ah dan nasabah.

Landasan syari'ah :

##### 1) Al-Qur'an

###### a. Surat Al-Baqarah : 282

*"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu buatlah secara tertulis".*

###### b. Surat Al-Maidah : 1

*"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu".*



- c. Surat Al-Baqarah : 280

*“Jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan”.*

2) Al-Hadits

- a. Hadits Riwayat Imam Muslim

*“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu suka menolong saudaranya”.*

- b. Hadits Riwayat Jamaah

*“Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”.*

Al-Qardh di BPR-Syari'ah Al-Falah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Qardh.

2.6. Penempatan Dana di Bank Lain

Pada saat dilakukan pengawasan yaitu periode 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, BPR-Snyari'ah Al-Falah menempatkan dananya pada bank-bank lain yang seluruhnya menerapkan prinsip syari'ah. Bank-bank tersebut adalah :

NO	NAMA BANK	JENIS PENEMPATAN
1.	Bank Muamalat	Tabungan dan Deposito
2.	Bank Syari'ah Mandiri	Tabungan, Giro dan Deposito
3.	Bank Sumsel Babel Syari'ah	Tabungan
4.	Bank BNI Syari'ah	Tabungan
5.	Bank Permata Syari'ah	Tabungan dan Deposito

### III. Jasa

3.1. Wakalah

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan/wewenang kepada pihak lain untuk kepentingan yang mewakilkan dalam hal-hal boleh diwakilkan. Adapun bentuk wakalah yang dipraktekkan oleh BPR Syari'ah Al-Falah umumnya berbentuk *Wakil bil Syira* (keagenan untuk pembelian). Dalam hal layanan wakalah ini, BPR Al-Falah telah memperhatikan ketentuan syari'ah yang menghendaki : (1) Kejelasan tentang subjek keagenan, yakni apa saja tindakan yang seyogyanya dilakukan oleh agen (wakil) yang

memegang amanah; (2) Kesanggupan pihak agen untuk menerima perwakilan yang disepakati, ditandai dengan penandatanganan akad yang dinyatakan secara spesifik.

Landasan syari'ah

#### 1) Al-Qur'an

##### a. Surat Al-Kahfi : 19

*"Maka suruhlah seorang dari kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah ia lihat makanan manakah yang lebih baik dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan anganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun".*

##### b. Surat Al-Baqarah : 283

*"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Tuhannya"*

##### c. Surat Al-Maidah : 2

*"Bertolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan bertolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan permusuhan".*

#### 2) Al-Hadits

##### a. Hadits Riwayat Imam Malik dalam Al-Muwaththa

*"Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang anshor untuk mengawinkan (Kabul perkawinan nabi) Maimunah".*

Pemberian Kuasa (wakalah) telah dikawal oleh Bank sehingga benar-benar sesuai dengan perjanjian. Wakalah dalam hal pembelian barang, nota pembelian barang telah disampaikan kepada Bank. Wakala di BPR-Syari'ah Al-Falah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

#### 3.2. Multi Jasa

Multi Jasa adalah bentuk baru yang ditawarkan BPRS Al-Falah kepada nasabah dan calon nasabahnya dengan dua kemungkinan layanan, yaitu berupa ijarah (penyewaan) atau Kafalah (kontrak perjanjian). Sebagai produk layanan baru, kedua bentuk layanan ini masih terus disempurnakan secara administratif agar kedepan ketepatan dimensi syari'ahnya benar-benar terpenuhi, sehingga promosi produk kepada khalayak ramai



dapat digencarkan dan masyarakat pengguna layanan merasa diuntungkan sebagaimana juga pihak BPR Syari'ah.

Kafalah adalah penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kaafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful'anhu). Terdapat empat jenis Kafalah di BPRS Al-Falah yaitu :

1. Bidang Kesehatan
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Sosial Kemasyarakatan
4. Bidang Pariwisata

Landasan Syari'ah :

1) Al-Qur'an

a. Surat Al-Maidah : 2

*"tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran"*

2) Al-Hadits

a. Hadits Riwayat Bukhori dari Salamah bin Akwa'

*"Telah dihadapkan kepada Rasulullah saw. Jenazah seorang laki-laki untuk disholatkan. Rasulullah saw bertanya : 'apakah ia mempunyai hutang / : sahabat menjawab : "tidak", maka Rasulullah saw lalu menyolatkannya, kemudian dihadapkan lagi kepada beliau jenazah yang lain, dan beliauapun bertanya : 'apakah ia mempunyai hutang ?, 'sahabat menjawab : 'ya ( ia berhutang), ' Rasulullah saw berkata : 'sholatkanlah temanmu itu !'"(beliau sendiri tidak mau menyolatkannya. Lalu Abu Qatada berkata : 'SAYA MENJAMIN HUTANGNYA, YA RASULULLAH !,' maka Rasulullah saw pun menyolatkan jenazah tersebut".*

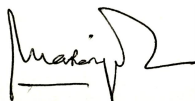
Kafalah di BPR Syari'ah Al-Falah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah.

Palembang, 10 Januari 2020

Dewan Pengawas Syari'ah

PT.BPR-Syari'ah Al-Falah,

Ketua,



Drs.H.M.A.Rasyid Hs. Umrie, M.BA.

Anggota,




Drs.H.Hambali, M.Si.

**OPINI SYARI'AH**  
**ATAS PELAKSANAAN OPERASIONAL BANK**  
**DALAM LAPORAN PUBLIKASI BANK**

Setelah membaca dan menganalisis Laporan Publikasi Bank BPR-Syari'ah Al-Falah periode 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, Dewan Pengawas Syari'ah menyatakan bahwa operasional BPR Syari'ah Al-Falah telah sesuai dengan prinsip syari'ah yang termuat dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Palembang, 10 Januari 2020  
Dewan Pengawas Syari'ah  
PT.BPR Syari'ah Al-Falah,

Ketua,



Drs.H.M.A.Rasyid Hs. Umrie,M.BA.

Anggota,



Drs.H.Hambali,M.Si.





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas No 246 Telp (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188 Fax (0341) 460782 Malang 65144

Nomor : E.6.k/331/FH-UMM/X/2019  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Observasi

Kepada : **Yth. Kepala BPR Syariah Al – Falah Kota Palembang**  
Jl. Palembang Betung, Kelurahan Sukajadi, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyu  
Asin Sumatra Selatan  
di

Tempat

**Assalamu 'alaikum Wr.Wb**

Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum ( S-1 ), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya Bapak/Tbu untuk memberikan ijin penelitian kepada:

Nama : Renistya Ajening Rarosati  
NIM : 201310110311293  
No. HP Mahasiswa : 08113601826  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Dewan Pengawas Syariah dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ditinjau dari Segi Kemanfaatan

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Malang, 09 Oktober 2019

A.n Dekan,  
Wakil Dekan I,



Catto Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 463513, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144

## SURAT TUGAS

Nomor: E.6.o/492/FH-UMM/IX/2019

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si  
Pembimbing I
2. Nama : Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum  
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

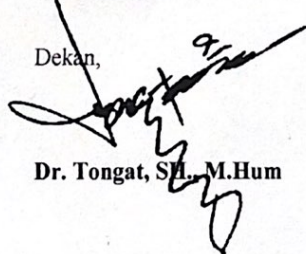
Nama : Renistya Anjening Rorosati  
NIM : 201310110311293  
Judul Skripsi : Analisis terhadap Peran OJK dalam Pergantian Pemegang Saham Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tugas dilaksanakan sejak surat tugas dikeluarkan sampai dengan selesai.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 10 September 2019

Dekan,

  
Dr. Tongat, SH., M.Hum





**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH AL FALAH**

Jalan Raya Palembang - Pangkalan Balai km 14,5 Kel. Sukajadi  
Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin  
Telp. (0711) 430028 / Fax (0711) 432008



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 24/044/DIR-OPS/UMUM/2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Riza Pahlepy, SE

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Jln. Raya Palembang – Pangkalan Balai KM. 14,5 Kel. Sukajadi Kec. Talang  
Kelapa Kab. Banyuasin Telp. 0711 – 430028.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Renistya Ajening Rarosati

Nim : 201310110311293

Fakultas : Hukum

Benar telah melakukan Observasi dengan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank  
Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al Falah pada tanggal 18 November 2019 dalam rangka untuk  
Tugas Akhir dengan judul "*Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan  
Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah*".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk  
dipergunakan seperlunya. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukajadi, 18 November 2019

PT. BPR Syari'ah Al Falah

Direksi,

  
**M. Riza Pahlepy, SE**  
Direktur Utama







**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH AL FALAH**

Jalan Raya Palembang - Pangkalan Balai km 14,5 Kel. Sukajadi  
Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin  
Telp. (0711) 430028 / Fax (0711) 432008



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 24/039/DIR-OPS/UMUM/2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Riza Pahlepy, SE

Jabatan : Direktur Utama

Alamat : Jln. Raya Palembang – Pangkalan Balai KM. 14,5 Kel. Sukajadi Kec. Talang  
Kelapa Kab. Banyuasin Telp. 0711 – 430028.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Renistya Ajening Rorosati

Nim : 201310110311293

Fakultas : Hukum

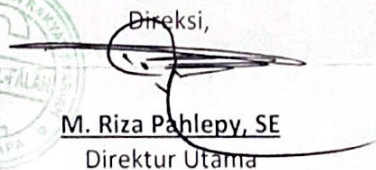
Benar telah melakukan penelitian di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Al Falah,  
guna penulisan Tugas Akhir dengan judul "*Implementasi Dewan Pengawas Syariah Dalam  
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ditinjau Dari Segi Kemanfaatan*".  
Dari tanggal 14 – 17 Oktober 2019.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk  
dipergunakan seperlunya. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukajadi, 21 Oktober 2019

PT. BPR Syari'ah Al Falah

Direksi,

  
M. Riza Pahlepy, SE

Direktur Utama







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 TELP. (0341) 464318-19 Psw. 124 Malang

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR

Pada hari ini 6 Desember 2019 tanggal 6 Desember 2019

Telah dilaksanakan Seminar Proposal TUGAS AKHIR, dengan Presenter Sebagai Berikut :

Nama : Renista Angening Rorosah  
No. Induk : 201310110311293  
Judul TA : Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam  
Pengawasan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat  
Syariah (Studi di PT. BPRS Al-Falah Kab. Banyuwangi, Sum-Sel)

Hasil seminar : 1. Tidak Ada Revisi

2. Revisi : Hal yang direvisi

1. Ratun Belakang. (Fatwa)
2. Metode Penelitian
3. Rihat Proposal

Demikian Berita Acara ini dibuat Rangkap 2 (dua) masing-masing :

1 (satu) lembar untuk Presenter dan Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing

Dr. Herwastuti S.H.Mg.

Malang, 6 Desember 2019

Presenter,

Notanara A.M.F.F





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 TELP. (0341) 464318-19 Psw. 124 Malang

DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROPOSAL

Nama mahasiswa : Renistya Angening Korotati  
Nomor Induk : 201310110311293  
Judul : Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi di PT. BPRS Al-Falah Kab. Bangkalan Sum-Sel)

No.	Nama Mahasiswa	No. Induk	Tanda Tangan
1.	Nazanara Ayudha Uega f.f.	201310110311254	
2.	Ferry Onoko. W	201310110311403	
3.	Flaski Imalia Adni	201610110311082	
4.	Sonja Angga Fadana	201310110311153	
5.	Zaky Ubaidillah	201310110311129	
6.	Coagad Enjang	201610110311052	
7.	Faris Syafrur Rizqi	201610430311101	
8.	AHMAD RAIS F.M	201610110311387	
9.	Novi Nur Atimah	20131030311102	
10.	Inwan Resfian	201610110311109	
11.	Ahmad Jalaluddin	201610110311430	
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Dosen Pembimbing,

Dr. Hekwastuti S.H.M.H.

Malang, \_\_\_\_\_

Presenter,

\_\_\_\_\_





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125, 126, 188

**KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama Mahasiswa : Renista Antening Rosati
2. No. Induk Mahasiswa : 201310110311293
3. Judul Tugas Akhir : Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi di BPRS AL-Falah Kab. Banyuwangi, Sum-Sel)
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir : 6 Desember 2019
5. Dosen Pembimbing : 1 Dr. Heruastek, SH, M.Si  
2 Dr. Tifir Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
6. Jadwal bimbingan : Mulai ..... Tgl. s/d .....

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1	30/10/2019			Konsultasi Proposal
2	3/11/2019			acc Proposal
3	9/12/2019			Konsultasi Bab I & Bab II
4	20/12/2019			Revisi Bab I & II
5	6/1/2020			acc Bab I & Revisi Bab II
6	10 Jan 2020			Revisi bab I & II
7	13 Jan 2020			acc Bab II & Revisi Bab III
8	20 Jan 2020			Revisi Bab III
9	23 Jan 2020			Acc bab I & II
10	29 Jan 2020			Revisi Bab III



No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
11	5-02-2020		Jeny	Data table susun permasalah
12	11-03-2020	[Signature]		Revisi Bab III
13	13-03-2020	[Signature]		Revisi Bab III
14	18-03-2020	[Signature]		acc Bab III
15	20-03-2020	[Signature]		Konsultasi Bab IV
16	27/03/2020	[Signature]		acc Bab IV
17	31-03-2020			o abstraksi
17	31-03-2020			Acc BAB III & IV
18	12-02-2020		Jeny	Revisi Bab III
19	19-02-2020		Jeny	Acc Bab III
20	14-03-2020		Jeny	Acc Bab IV

7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir ..... 27/3/2020

8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujikan.....

Pembimbing I

[Signature]

Dr. Henwasari SHMS

Malang,

Pembimbing II

[Signature]

Dr. Fikri Wiryan

Mengetahui  
Dekan,